

BPK Temukan 178 Kasus Total Rp 159 M

PONTIANAK. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalbar menyatakan keprihatinannya atas LHP BPK RI terhadap APBD Kalbar 2010 akibat banyaknya kasus yang menjadi temuan.

"Setidaknya ada 178 kasus temuan BPK, yang merugikan daerah mencapai Rp 159 miliar dan 11.000 dolar AS lebih. Kita minta kepada BPK segera melakukan audit investigatif atas temuan-temuan tersebut," tegas Ketua Fraksi PPP DPRD Kalbar, HM Ali Akbar AS, kepada Equator, Selasa (26/7).

Fraksi ini juga mengingatkan kepada gubernur beserta pejabat

yang melakukan tugas pungutan berpegang pada koridor hukum dan aturan yang ada. Banyak kepala daerah yang termuat di koran, pejabat terseret masalah hukum. Baik di KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya.

"Kami mengingatkan ini, agar gubernur tidak terjebak dengan masalah-masalah tersebut. Ini wujud kecintaan kami pada gubernur, agar memimpin daerah dengan baik. Jangan terulang kembali adanya pejabat yang menyimpan keuangan daerah di rekening pribadi, yang seharusnya disetorkan ke kas daerah," kata Ali Akbar.

■ Halaman 7

Beberapa Temuan BPK

- DKP : Pendapatan daerah tahun 2008, 2009, 2010 sebesar Rp 128 juta tidak disetor ke rekening kas daerah, melainkan disimpan ke rekening pribadi, yakni atas nama sekretaris dinas.
- RSUD Soedarso : Realisasi penerimaan berasal dari klaim Jamkesmas senilai Rp 6,2 miliar tidak disetorkan ke kas daerah dan langsung digunakan.
- Akper Sintang : Realisasi penerimaan biaya kuliah dari mahasiswa 2010 senilai Rp 2,1 miliar tidak disetorkan ke kas daerah.
- UPPD Singkawang dan Mempawah : Menerima dana hibah dari pemerintah kabupaten, tapi tidak disetorkan ke kas daerah. Dana langsung digunakan untuk pembelian sepeda motor dan biaya operasional pemungutan pajak.
- SPP SMPA Singkawang : Realisasi penerimaan uang tidak disetorkan ke kas daerah, tidak dilaporkan dan langsung digunakan senilai Rp 430 juta lebih.

BPK Temukan

Terhadap temuan tersebut, Fraksi PPP juga meminta kepada gubernur untuk menindak tegas pejabat yang bersangkutan, bukan hanya oknum, tapi juga menindak kepala atau pimpinan SKPD. Karena ada pembiaran dari kepala SKPD, mengetahui dan merestui adanya penyimpanan yang dilakukan staf atau bawahannya.

Bahkan, Ali Akbar menilai, tidak menutup kemungkinan

kepala SKPD juga terlibat. Dengan demikian, kepala SKPD itu juga dapat ditindak, baik sanksi administrasi, diganti, bahkan harus disanksi dan diserahkan ke aparat penegak hukum. "Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan keseriusan dari kepala SKPD. Lemahnya tanggungjawabnya sebagai pembantu gubernur," sesalnya.

Politisi daerah pemilihan Kota Pontianak ini juga memaparkan beberapa SKPD yang melanggar

.... dari halaman 1
ketentuan. Beberapa instansi yang menjadi cacatan Fraksi PPP diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, RSUD Soedarso, Akademi Keperawatan Sintang, Dinas Pendapatan Daerah (beberapa UPPD), dan SPP SPMA.

"Bahkan dari data yang ada, diketahui terdapat penerimaan sebesar Rp 8,8 miliar lebih tidak melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah," kata Ali Akbar. (jul)